



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VIII DPR RI**

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).**

---

Rapat Ke	: 20
Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat/ke-	: Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan / Ke- 2
Dengan	: Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial dan Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Senin, 8 Oktober 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: <b>Dr. H. TB ACE HASAN SYADZILY, M.Si</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: Membahas Kebijakab, Sistem dan Teknis Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
Hadir	: ..... orang dari 26 orang Anggota

#### **I. PENDAHULUAN:**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII DPR dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI dan Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diwakili oleh Kepala Unit Komunikasi dan Kemitraan membahas **“Kebijakan, Sistem dan Teknis Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan telah mendapat penjelasan dari Sekretaris Jenderal Kemensos RI Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI dan Kepala Unit Komunikasi dan Kemitraan TNP2K mengenai Kebijakan, Sistem dan Teknis Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan.
2. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan mendukung usulan Kementerian Sosial RI untuk mendukung peningkatan status unit kerja Pusat Data Informasi Kementerian Sosial RI, dari eselon II menjadi eselon I.
3. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan meminta kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga terkait untuk menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh pandangan Anggota Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan, antara lain:
  - a. Melakukan pemutakhiran data secara akurat dan menyeluruh di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara mandiri di luar Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk mendukung proses verifikasi dan validasi data kemiskinan.
  - b. Memastikan *updating* data secara cepat dan tepat secara menyeluruh di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan dukungan aplikasi jaringan teknologi informasi yang kuat.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 14.00 WIB

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI  
PANJA VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN  
KETUA**

**Ttd.**

**Dr. H. TB ACE HASAN SYADZILY, M.Si.**